



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2079/2023

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memperoleh persetujuan izin prakarsa penyusunan pada tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2079/2023
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Wakil Menteri Kesehatan
- III. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 2. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- V. Sekretaris :
 - 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
 - 2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- VI. Anggota :
 - 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 - 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 - 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan

6. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.
(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet)
7. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
8. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
9. Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng
(Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
10. Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
(Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
11. Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K
(Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
12. dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid
(Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
13. dr. Nia Reviani, MAPS
(Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
14. Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB
(Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
15. Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
(Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

16. Ichsan Zulkarnaen
(Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
17. Iktut Hadi Priatna
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian)
18. Mochamad Gungun W. N.
(Analisis Produk Hukum, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian)
19. Nanang Rafii' Misbahhudin
(Pengelola Kegiatan dan Anggaran, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian)
20. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D
(Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas)
21. Raden Rara Rita Erawati, S.H., LL.M
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas)
22. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia
23. Kolonel Kes M. Washiludin AR, SKM., MKKK
(Kabidbangkes Puskes TNI)
24. Inspektur Jenderal Polisi dr. Asep
Hendradiana, Sp,An-TI., Subsp.IC (K), M.Kes
(Kapusdokkes Polri)
25. Brigadir Jenderal Polisi dr. Didiet Setioboedi, Sp.
THT-KL, DFM
(Sespusdokkes Polri)
26. Brigadir Jenderal Polisi dr. Hariyanto, Sp.PD
(Karumkit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri)
27. Brigadir Jenderal Polisi dr. A. Nyoman Purnama
Wirawan, Sp.F
(Karodokpol Pusdokkes Polri)
28. Brigadir Jenderal Polisi dr. Hisbulloh Huda, Sp.PD
(Karokespol Pusdokkes Polri)

29. Brigadir Jenderal Polisi dr. Prima Heru Yuliantoro,
M.Kes
(Karolab Pusedokkes Polri)
30. Kombes Pol Dr. dr. Jaka Kusnanta Wahyuntara,
Sp.BM
(Ka LKOK Pusedokkes Polri)
31. Kombes Pol drg. Waloejo Noegroho, Sp.Pros
(Ahli Utama Rumkit Bhayangkara Tk I R. Said
Sukanto)
32. Pembina I drg. Anggelika Sri Hartini
(Dokter Gigi Ahli Madya Pusedokkes Polri)
33. Nizam
(Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi)
34. Nur Syarifah
(Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
35. Tjitjik Sri Tjahjandarie
(Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
36. Sri Suning Kusumawardani
(Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi)
37. Lukman
(Direktur Kelembagaan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
38. Ineke Indraswati
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
39. Lido Cahyadi
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda, Biro Hukum, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

40. Robertus Ulu Wardana
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
41. Dwiarto Berman Gunadi
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
42. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan)
43. Putut Hari Satyaka
(Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan)
44. Reni Mursidiyanti
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan)
45. Sunardi Manampiar Sinaga
(Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan)
46. Yuli Adiratna
(Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan)
47. Muhamad Idham
(Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
48. Hery Sutanto
(Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
49. Dinas Titus Jogaswitani
(Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan)
50. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian
51. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian

52. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian
53. Wahyu Setyawan
(Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
54. Aditya Dhanwantara
(Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
55. Bastian
(Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
56. Muh. Umar Fauzi
(Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
57. R. Gani Muhamad, SH., M.AP
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri)
58. Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri)
59. Drs. Edy Suharmanto, M.Si
(Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri)
60. Muhamad Valiandra, S.E., MAP
(Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
61. Drs. Paskalis Baylon Meja
(Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
62. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP
(Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu, Kementerian Dalam Negeri)
63. Suhadi Lili
(Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Kementerian Sosial)

64. Salahuddin
(Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial,
Kementerian Sosial)
65. Abdul Rozak
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda, Kementerian Sosial)
66. Sri Hariyati, S.H., M.M
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan)
67. Yunus Sirundu, S.E., M.Si
(Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan)
68. Muhammad Suaib Sulaiman, S.E., M.M
(Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan,
Kementerian Perdagangan)
69. Arif Sulisty, S.Kom., M.Kom
(Direktur Impor, Kementerian Perdagangan)
70. Novita Sari, S.E., M.M
(Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian
Perdagangan)
71. Yogo Dwiantoro, S.Kom, M.SE
(Analisis Perdagangan Ahli Madya, Kementerian
Perdagangan)
72. Santhy Yanuar Darma Putri, S.H., M.H
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda, Kementerian Perdagangan)
73. Imam Suwita, S.T
(Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Kementerian
Perdagangan)
74. Ezra Bintang Tumpal, S.H., L.LM
(Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Kementerian
Perdagangan)
75. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
(Kepala Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama)
76. H. Saan, S.H., M.H
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya, Kementerian Agama)

77. Drs. Sayid Muhadhar, M.Si
(Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
78. Ir. Achmad Gunawan Widjacksono, MAS
(Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
79. C.H. Nety Widayati
(Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
80. Supardi, S.H., M.H
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
81. Dra. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, M.Si
(Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
82. Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum
(Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
83. Eni Widiyanti, S.E, MPP, M.S.E
(Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
84. Muhammad Ihsan, S.Ag, MA
(Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
85. Margareth Robin Korwa, S.H., M.H
(Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
86. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H
(Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)

87. Cahyarini
(Ketua Tim Pengelolaan Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
88. Silvia Fibrianti
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
89. Drs. Luthfy Latief, M.Si
(Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
90. Teguh Hadi Sulistiono, S.IP., M.Si
(Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
91. Rully Rachman, S.H., M.H
(Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
92. Dr. Drh. NLP Indi Dharmayanti, M.Si
(Kepala Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
93. Mila Kencana S.IP.,M.A.
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
94. dr. Armedy Ronny Hasugian M.Biomed
(Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
95. Dr. dr. Telly Purnamasari Agus M.Epid
(Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
96. Reghi Perdana, SH, LLM
(Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM)
97. Dra. Tri Asti Isnariani, Spt, M.Pharm
(Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, BPOM)
98. Dian Putri Anggraweni S.Si, Apt, M.Farm
(Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, BPOM)


99. Anisyah, S.Si, Apt, MP
(Direktur Standarisasi Pangan Olahan, BPOM)
100. I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM
(Direktur Cegah Tangkal, BPOM)
101. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
102. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
103. Hadi Wahyuningrum, S.H., M.M
(Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
104. Dra. Lismia Elita, M.M
(Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
105. Devriel Sogia, S.T., M.M
(Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
106. Dr. Abd. Ghofar, S.Si., M.TI
(Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
107. dr.Noer Aziza
(Penata KKB Ahli Madya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
108. Dr. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, SH., MH., M.Kn
(Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)
109. Dr. Anas, S.Sos., M.M
(Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional)
110. Yusra Egayanti, Ssi., Spt., MP
(Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional)

VII. Sekretariat : Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003